

Panglima: 2.820 Prajurit TNI Bakal Dipindah ke IKN pada Tahun Ini

JAKARTA (IM) - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengatakan, sebanyak 2.820 prajurit akan dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada tahun ini.

Rencana itu diungkapkan Agus dalam sambutannya pada Rapat Pimpinan TNI-Polri di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (28/2).

"Pada tahun ini juga direncanakan pemindahan personel TNI, baik Mabes TNI, TNI AD, AL, dan AU sejumlah 2.820 orang," kata Agus.

Namun pemindahan personel TNI tersebut akan menyesuaikan kesiapan bangunan dan perkantoran di IKN. Rencana pemindahan personel itu, selaras dengan visi TNI yaitu *well organized*. "Untuk itu, kami sangat mengharapkan dukungan Bapak Presiden (Joko Widodo) dalam rangka mewujudkan rencana di atas," ujar Agus.

Dalam kesempatan itu, Agus mengungkap rencana Markas Besar TNI untuk beberapa tahun ke depan. Matra darat akan menggelar 37 Komando Daerah Militer (Kodam).

"TNI AD rencana akan

membangun dan menggelar 37 Kodam, di mana dari 37 Kodam yang akan digelar, 15 Kodam diperkuat dengan Korem (komandan resor militer), sedangkan 22 Kodam tanpa Korem di bawahnya," kata Agus.

Jumlah itu termasuk Kodam di IKN dan penempatan dua batalyon baru. Sebelumnya, TNI AD memang berencana akan menggelar Kodam di setiap provinsi.

Untuk matra laut, TNI AL berencana melakukan peningkatan alih status Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) menjadi Kotamandala Operasi dan Pembinaan.

"Dengan nomenklatur Kodamar (Komando Daerah Maritim) kelas A, jumlah 8 Lantamal dan 6 Lantamal menjadi Kodamar kelas B. Serta pembangunan Pasukan Marinir (Pasmar) di IKN," ujar Agus.

Sementara itu, untuk matra udara, TNI AU berencana meningkatkan lima Lanud menjadi tipe A.

"TNI AU rencana akan membangun Lanud di IKN, meningkatkan status 5 Lanud tipe A peningkatan status 2 Lanud tipe B, pembentukan Lanud tipe C dan membentuk skadron-skadron baru," kata Panglima TNI. ● han

Menko Polhukam Minta PGI Ikut Jaga Kondusifitas hingga Pelantikan Presiden

JAKARTA (IM) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolkam) RI, Hadi Tjahjanto, meminta pengurus Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) untuk turut menjaga suasana kondusif hingga pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada Pemilu 2024.

Hadi menyambangi kantor PGI di Graha Oikumene Salemba, Jakarta Pusat pada Rabu (28/2).

"Baru saja saya bertemu dengan pimpinan dan seluruh anggota PGI. Kita ketahui bersama bahwa PGI ini adalah Persekutuan Gereja Protestan besar. Memiliki 97 Gereja sinode di seluruh Indonesia termasuk 27 wilayah. Ini merupakan satu organisasi persekutuan yang besar," ujar Hadi Tjahjanto.

Hadi menyebutkan PGI sangat berperan dalam men-

jaga keharmonisan masyarakat di Indonesia.

"Apalagi di saat ini kita baru saja melakukan pesta demokrasi yaitu Pileg dan Pilpres yang dilaksanakan pada 14 Februari kemarin," katanya.

Ia meyakini kondisi saat ini bisa terlaksana dengan aman dan tenang salah satunya berkat sinergi dengan PGI.

"Kami berbincang sepekat menjaga kondisi yang aman dan tenang sampai selesainya proses demokrasi yaitu terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden hingga proses pelantikan," ujar Hadi menambahkan.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Hadi diundang melakukan silaturahmi ke tiga lokasi berbeda pada Rabu 28 Februari 2024, yakni di PGI, KWI, dan PP Muhammadiyah. ● mei

Buntut Dugaan Pelecehan Seksual, Rektor Universitas Pancasila Dinonaktifkan

JAKARTA (IM) - Rektor Universitas Pancasila, ETH, dinonaktifkan dari jabatannya setelah terungkap dugaan pelecehan seksual terhadap dua stafnya, yakni RZ (42) dan D. RZ terlebih dahulu melapor ke pecehan yang dialaminya ke Polda Metro Jaya pada 12 Januari 2024. Sedangkan D melapor ke Mabes Polri pada 28 Januari 2024.

Menurut Sekertaris Yayasan dan Pendidikan Universitas Pancasila (YPPUP) Yoga Satriyo, sebetulnya jabatan ETH sebagai rektor akan berakhir pada 14 Maret 2024.

"Tetapi, menimbang dengan suasana yang seperti ini dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, kemudian rapat memutuskan (ETH) dinonaktifkan sampai 14 Maret 2024," ucap Yoga, Selasa (27/2/).

Penetapan tanggal penonaktifkan ETH hingga 14 Maret 2014, kata Yoga, bertepatan dengan berakhirnya masa baktinya. Dengan

adanya keputusan penonaktifan ETH sebagai Rektor Universitas Pancasila, pihak yayasan telah menunjuk Wakil Rektor I Sri Widyastuti sebagai pelaksana tugas rektor.

"Sampai saat ini sudah ada delapan calon rektor yang mendaftar. Dan kami tunggu sampai 1 Maret, kemudian, kami proses. InsyaAllah setelah lebaran ada rektor baru," ucap Yoga.

Dugaan pelecehan seksual yang dialami RZ terjadi setahun lalu, sekitar Februari 2023. Pada bulan yang sama saat RZ dimutasi ke pascasarjana Universitas Pancasila. Sementara itu, dugaan pelecehan seksual yang dialami D terjadi sekitar Desember 2023.

Kala itu, D mengundurkan diri dari kampus lantaran ketakutan usai dilecehkan oleh sang rektor. Adapun ETH kini dilaporkan oleh RZ dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual ke Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya. ● mei

2 | Polhukam

FOTO: ANTARA



Presiden Jokowi Minta TNI-Polri Berani Manfaatkan Teknologi dan Waspada Drone

Presiden Jokowi meminta TNI-Polri lakukan deteksi dini, mengantisipasi dan memperkuat profesionalisme dalam pelayanan terhadap masyarakat.

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta TNI Polri agar berani menggunakan teknologi untuk menjaga pertahanan negara, mengingat perkembangan perang siber yang terus meningkat.

"Pemanfaatan teknologi dalam perang konvensional,

perang siber, akan semakin meningkat. TNI, Polri harus berani masuk ke hal-hal yang berkaitan dengan teknologi," kata Jokowi, Rabu (28/2).

Jokowi mengatakan, alutsista berupa pesawat tempur hingga tank memang diperlukan. Ia mengingatkan terkait penggunaan drone dalam

perang.

Kepala Negara menyinggung penggunaan drone canggih yang membunuh Komandan Pasukan Quds Garda Revolusi Iran, Qasem Soleimani pada tahun 2020.

"Pesawat tempur perlu? Iya. Tank perlu? Iya. Tapi hati-hati juga dengan drone. Saya ingat di tahun 2020 bulan Januari, ada penggunaan drone yang saya kaget karena begitu sangat presisi dan begitu sangat akurat menjerat siapa yang diinginkan. Saat itu Mayjen Soleimani ini koman-

dan Quds dari pengawal besar revolusi Iran tertembak dari drone yang dipersenjatai," katanya.

Kepala Negara menyorot penggunaan drone, yang teknologinya sudah canggih dan akurat hingga bisa mendeteksi orang.

"Tapi hati-hati juga dengan drone. Saya ingat di tahun 2020 bulan Januari, ada penggunaan drone yang saya kaget karena begitu sangat akurat menjerat siapa yang diinginkan," ujar Jokowi.

Jokowi menceritakan ketika Mayor Jenderal (Mayjen) Qasem Soleimani, Komandan tentara Pasukan Quds di Iran, tertembak drone yang dikendalikan dari jarak jauh.

Ia mengingatkan jajaran TNI Polri mengamati dan mengikuti perkembangan teknologi.

"Saat itu Mayjen Soleimani komandan Quds dari

MENHAN SERAHKAN 228 ALUTSISTA DAN MOTOR LISTRIK

Sejumlah prajurit TNI berjalannya di dekat alutsista yang diserahkan Menhan Prabowo Subianto di parkir di Mabes TNI, Jakarta, Rabu (28/2). Menhan Prabowo Subianto menyerahkan sebanyak 228 alat utama sistem senjata (Alutsista) yaitu Pandur, Harimau, Ranpur Anoa, Ranpur Komodo APC, Ranpur Badak Canon 90, Maung V3, Rigid Buoyancy Boat, Ransus, Rantis, Truk 4x4, Truk 2,5 Ton dan sepeda motor trail listrik untuk TNI dan Polri.

Cegah Kekerasan Santri, Dilarang Ada Ruang Gelap di Pesantren

JAKARTA (IM) - Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama (Dirjen Pendidikan Agama), Muhammad Ali Ramdhani, melarang ada ruang gelap di pesantren. Larangan tersebut sebagai respons atas kejadian kekerasan fisik dan seksual di wilayah pondok pesantren (ponpes).

"Salah satu keinginan besar kita di dalam hal ini adalah terutama di kekerasan seksual dan termasuk perlindungan, itu tidak boleh ada ruang gelap di pondok pesantren," kata Ali kepada wartawan, di Kantor Kemenag Jakarta, Selasa (27/2).

Menurutnya, ruang gelap menjadi tempat pertama yang memiliki relasi kuasa yang sangat kuat antara santri dan kiai atau ibu nyai dalam ponpes tersebut.

Sehingga, santri kerap kali ditarik pada ruang-ruang yang gelap yang tidak terhubung, tidak bisa ditengok dari luar dan sungguh privat.

"Ruang gelap itu tidak

harus terhubung tetapi tidak bisa ditengok dari luar. Ada ruang private yang tidak diperkenankan," katanya.

Ruang gelap tersebut tidak boleh berada di KSKK Madrasah (Direktorat Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan Kemenag). Sama halnya di ponpes yang mana ruang pembelajaran harus dapat dimonitor dari luar.

"Sama halnya di pondok pesantren bahwa ruang pembelajaran itu harus bisa ditengok dari luar. Jadi tidak ada pendidikan private yang meniadakan kesempatan atau niat untuk melakukan hal yang tidak baik," ucapnya.

Dia pun berharap agar ponpes tidak lagi memasukkan santrinya ke dalam ruang gelap. Dengan membangun hubungan yang baik antara senior dan Junior.

"Mudah-mudahan dengan tidak ada ruang gelap ini, kira-kira mencoba membangun hubungan yang baik walaupun relasi kuasa itu baik tetapi tidak ada

ruang-ruang senior ke junior. Karena biasanya perundungan itu dari senior ke junior," kata Ali.

Ali mengemukakan keprihatinan atas kematian seorang santri di Pondok Pesantren PPTQ Al Hanifiyah Mojo, Kabupaten Kediri, diduga akibat dianiaya seniornya.

Dengan demikian dia mengimbau agar orang tua dapat lebih cermat dalam memilih pesantren. Yakni dengan memilih pesantren yang tidak memutuskan hubungan antara orang tua dan santrinya.

"Maka ketika memilih pesantren, harapan saya masyarakat memilih pesantren-pesantren yang bisa diakses secara baik oleh orang tua dalam periode-periode yang sangat intens. Orang tua memiliki hak yang kuat untuk memantau setiap perkembangan dari sisi fisik, dari sisi pengetahuan dan dari sisi semua aspek yang menyangkut anaknya, apalagi anak ini belum dewasa," kata Ali. ● mei

Eks Mentan SYL Didakwa Ancam Pejabat yang Tidak Memberi Uang akan Dinonjobkan

JAKARTA (IM) - Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap bahwa eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) meminta orang kepercayaan mengumpulkan uang dari para pejabat Kementerian Pertanian (Kementan). Uang tersebut untuk kepentingan pribadi dan keluarganya.

Orang kepercayaan yang dimaksud adalah eks Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan, Muhammad Hatta, eks Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementan, Kasdi Subagyo, Staf Khusus Menteri Pertanian RI Bidang Kebijakan, Imam Mujahidin Fahmid, dan Ajudannya, Panji Harjanto.

"Terdakwa menyampaikan kepada jajaran di bawah terdakwa apabila para pejabat Eselon I tidak dapat memenuhi permintaan terdakwa tersebut, maka jabatannya dalam bahaya, dapat dipindahtugaskan atau dinonjobkan," ungkap Jaksa KPK, Masmudi dalam dakwaannya yang dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Rabu (28/2).

"Apabila ada pejabat yang tidak sejalan dengan

hal yang disampaikan terdakwa tersebut agar mengundurkan diri dari jabatannya," ucap Jaksa melanjutkan.

Terima Rp44,5 Miliar

Tak hanya itu, SYL juga disebut meminta jatah 20 persen anggaran dari setiap Sekretariat, Direktorat, dan Badan di Kementan.

Dalam perkara ini, SYL didakwa telah melakukan pemerasan dan menerima gratifikasi dengan total Rp 44,5 miliar bersama Muhammad Hatta dan Kasdi Subagyo.

Atas perbuatannya, SYL disanggakan melanggar Pasal 12 huruf c Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP. ● han



KPU TUNDA PLENO REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILU 2024 Ketua KPU Hasyim Asy'ari (ketiga kiri) bersama Komisiner KPU memimpin rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 tingkat nasional di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (28/2). Rapat pleno tersebut harus ditunda karena pimpinan KPU akan menjalani sidang pemeriksaan kode etik di kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu terkait kebarucaran data Daftar Pemilih Tetap Pemilu tahun 2024.

PENGUMUMAN RENCANA PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF (KIK) DAN PROSPEKTUS REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND

PT Syailendra Capital, selaku Manajer Investasi dari REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND ("SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND") dengan ini bermaksud menyampaikan rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") dan Prospektus SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND sehubungan dengan perubahan metode perhitungan Imbalan Jasa untuk masing-masing Manajer Investasi & Bank Kustodian dari semula "dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan" menjadi "dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan".

Rincian perubahan ketentuan dalam KIK dan Prospektus tersebut di atas dapat diperoleh di Manajer Investasi.

Demikian pengumuman ini disampaikan kepada para Pemegang Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND serta pihak-pihak yang berkepentingan.

SYAILENDRA Jakarta, 29 Februari 2024
Manajer Investasi
PT SYAILENDRA CAPITAL
berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

PENGUMUMAN

Menindaklanjuti hasil Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT WETAR PRIMA KARYA MULIA tanggal 18 Agustus 2023 Nomor 06, yang dibuat di hadapan HERU SISWANTO, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang perihal pembubaran PT WETAR PRIMA KARYA MULIA (Dalam Likuidasi) yang berkedudukan di Saumlaku, Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada saat ini Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan dilanjutkan dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT WETAR PRIMA KARYA MULIA (Dalam Likuidasi) tanggal 27 Februari 2024 Nomor 04, yang dibuat di hadapan HERU SISWANTO, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang perihal Laporan Pertanggungjawaban Likuidator atas Hasil Akhir Proses Likuidasi, maka dengan ini Likuidator mengumumkan bahwa:

Proses Likuidasi PT WETAR PRIMA KARYA MULIA telah selesai sepenuhnya dan dengan ini dinyatakan telah DILIKUIDASI LIKUIDATOR

PENGUMUMAN

Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 27 Februari 2024 No. 983, yang dibuat di hadapan Notaris Sugeng Purnawan, S.H., Telah diambil keputusan untuk membubarkan Perseroan Terbatas PT. INDAH DUTA SIMFONIE, berkedudukan di Jakarta Utara.

Demikian pengumuman ini dibuat atas kesepakatan bersama.

Direksi
PT. INDAH DUTA SIMFONIE